

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu negara meningkat dalam jangka panjang. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM), dimana secara potensial Indonesia mempunyai kemampuan sumber daya manusia yang cukup untuk dikembangkan.

Di sisi lain, dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Indonesia dihadapkan dengan berbagai kendala dibidang ketenagakerjaan, seperti kesempatan kerja yang masih menjadi masalah utama. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan atau ketimpangan untuk mendapatkannya. Ketimpangan dalam mendapatkan kesempatan kerja akan berdampak pada meningkatnya angka pengangguran. Pengangguran di negara-negara sedang berkembang pada umumnya didominasi oleh pengangguran usia muda dan berpendidikan. (Todaro & Smith, 2010).

Pendidikan mencerminkan tingkat kepandaian (kualitas) atau pencapaian pendidikan formal dari penduduk suatu negara. Semakin tingginya tamatan pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kemampuan kerja (*the working*

capacity), atau produktivitas seseorang dalam bekerja. Pendidikan formal merupakan persyaratan teknis yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian kesempatan kerja. Selain itu, tingkat upah juga memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi pula kemampuan untuk meningkatkan kualitas seseorang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui tamatan pendidikan dan tingkat upah diharapkan dapat mengurangi jumlah tingkat pengangguran terdidik, dengan asumsi tersedianya lapangan pekerjaan formal.

Pengangguran terdidik belum sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia. Setiap tahun pengangguran terdidik terus meningkat jumlahnya, sementara lulusan pendidikan tinggi yang langsung diterima bekerja sangat sedikit akibatnya banyak lulusan pendidikan tinggi menganggur pasca lulus. Pengangguran terdidik merupakan kekurangselarasan antara perencanaan pembangunan pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Hal tersebut merupakan penyebab utama terjadinya jenis pengangguran ini.

Salah satu penyebab pengangguran terdidik meningkat adalah bertambahnya jumlah pencari kerja yang pesat namun tidak diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang cukup, jumlah pengangguran yang saat ini lebih di dominasi oleh lulusan SLTA/Kejuruan dan Perguruan Tinggi (tenaga kerja terdidik) menunjukkan kemerosotan produktivitas sumber daya manusia yang seharusnya sumber daya manusia harus dimanfaatkan dengan benar, karena sumber daya manusia merupakan pelaku dalam proses pembangunan ekonomi, problematika ini sudah selayaknya memperoleh perhatian yang serius.

Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Menurut BPS (2014), bahwa tingkat pengangguran terdidik adalah berapa banyak jumlah pencari kerja yang memiliki tingkat pendidikan SMA keatas yang sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha yang tidak mencari kerja karena merasa tidak mampu.

Masalah pengangguran ini merupakan masalah yang selalu menjadi persoalan bangsa Indonesia yang sulit untuk dipecahkan. Hal ini mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus bertambah dan tidak diiringi dengan tingginya permintaan akan tenaga kerja dan kurangnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada sehingga menyebabkan tingginya tingkat pengangguran. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhinya seperti tingkat pendidikan serta pertumbuhan ekonomi, dimana pendidikan diharapkan dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang ditempuhnya.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau dalam rangkaian kepulauan di Indonesia, Pulau Jawa terbagi dalam enam wilayah administrasi pemerintahan Provinsi yaitu, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan serta memiliki jumlah tenaga kerja yang besar dengan tingkat pengangguran terdidik cukup tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia. Dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang memiliki permasalahan di bidang ketenagakerjaan, menurut Badan Pusat Statistik (2015). Pulau Jawa adalah Pulau yang menjadi urutan pertama se-Indonesia yang memiliki jumlah pengangguran

terbanyak. Diketahui hampir 60 persen jumlah pengangguran di Indonesia berada di Pulau Jawa. Oleh karena itu, pengangguran menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran.

Di Pulau Jawa setiap tahun jumlah tamatan pendidikan SMA/SMK, Diploma/ Universitas semakin meningkat, dan tidak diikuti tersedianya lapangan pekerja yang memadai sehingga menyebabkan pengangguran terdidik semakin meningkat jumlahnya. Berikut tabel tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019-2020.

Tabel 1.1
Tingkat Pengangguran Terdidik Antar Provinsi di Pulau Jawa
Tahun 2019-2020 (Persen /Tahun)

Nama Provinsi	2019		2020	
	SMA/SMK	Diploma/Univ	SMA/SMK	Diploma/Univ
DKI Jakarta	9,56	4,30	12,26	7,59
Banten	11,96	5,24	13,65	6,46
Jawa Barat	10,89	6,78	13,73	10,19
Jawa Tengah	6,35	5,53	8,41	7,01
DI Yogyakarta	4,08	4,39	6,16	6,06
Jawa Timur	7,77	4,68	8,04	4,45
Rata-Rata	8,44	5,15	10,37	6,96

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa tingkat pengangguran terdidik di 6 Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019-2020 terdiri dari SMA/SMK dan diploma/universitas mengalami fluktuasi. Tingkat pengangguran terdidik SMA/SMK terbanyak berada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 13,73 persen, lalu untuk tingkat pengangguran terdidik tingkat diploma/universitas yang paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 sebesar 10,19 persen. Tingkat pengangguran terdidik terendah terjadi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 pada tingkat diploma/universitas sebanyak 5,24 persen. Tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa memiliki jumlah yang sangat besar karena sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau

Jawa. Sementara, di daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih kekurangan tenaga kerja. Akibatnya, di Pulau Jawa banyak terjadi pengangguran. Sementara, di daerah lain masih banyak sumber daya alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal. Pengangguran jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja mengakibatkan tidak semua angkatan kerja dapat diserap oleh lapangan kerja (pengangguran). Hal ini lebih diperparah dengan banyaknya tenaga kerja yang kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain itu, pengangguran juga terjadi sebab angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta oleh dunia usaha.

Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran tenaga kerja terdidik telah menjadikan masalah yang makin serius. Kemungkinan ini disebabkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan maka makin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai. Proses untuk mencari kerja yang lebih lama pada kelompok pencari kerja terdidik disebabkan mereka lebih banyak mengetahui perkembangan informasi di pasar kerja, dan mereka lebih berkemampuan untuk memilih pekerjaan yang diminati dan menolak pekerjaan yang tidak sesuai (Mulyono, 1997).

Secara ekonomi makro, pengangguran menjadi permasalahan pokok baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Rahmawati dan Hadiwiyono (2014:3) bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya tingkat pengangguran terdidik adalah adanya penawaran tenaga kerja yang melebihi diri permintaan, kebijakan rekrutmen tenaga kerja sering tertutup, perguruan tinggi sebagai proses untuk menyiapkan lulusan atau tenaga kerja yang siap pakai belum

berfungsi sebagaimana mestinya, dan adanya perubahan kegiatan ekonomi dan perubahan struktur industri.

Todaro dan Smith (2006) menyatakan bahwa selama bertahun-tahun, penelitian bidang ekonomi menitikberatkan penelitiannya di bidang pendidikan, dan melihat keterkaitan antara pendidikan dengan produktivitas kerja secara output yang dihasilkan. Hal ini dikarenakan karena titik berat persoalan perekonomian adalah tingkat pertumbuhan output total yang dihasilkan oleh suatu negara. Selanjutnya, Todaro dalam buku yang sama juga menyatakan bahwa pendidikan merupakan tujuan pembangunan yang sangat mendasar. Pendidikan memegang peranan kunci dalam membangun ekonomi dan memajukan sebuah bangsa, membantu menyerap teknologi, menciptakan pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan.

Faktor lain yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Keadaan tersebut dapat mengakibatkan lambatnya proses tingkat pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan. Menurut Sukirno (2008), tingkat pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Karena jumlah penduduk bertambah setiap tahun yang dengan sendirinya kebutuhan konsumsi sehari-hari juga

bertambah setiap tahun, maka dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Selain dari sisi permintaan (konsumsi), dari sisi penawaran, pertumbuhan penduduk juga membutuhkan pertumbuhan kesempatan kerja.

Tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa dibarengi dengan penambahan kesempatan kerja akan mengakibatkan ketimpangan dalam pembagian dari penambahan pendapatan tersebut (*ceteris paribus*) yang selanjutnya akan menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan kemiskinan. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kerja itu sendiri hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa). Atau produk domestik bruto (PDB), yang terus menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, tingkat pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDRB, yang berarti peningkatan pendapatan nasional.

Dalam demikian, tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (*necessary condition*) bagi pengurangan tingkat pengangguran terdidik. Adapun syarat kecukupan ialah bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa tersebut efektif dalam mengurangi tingkat pengangguran terdidik.

Tabel 1.2

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2020 (Persen/Tahun)

Nama Provinsi	2018	2019	2020
DKI Jakarta	6,11	5,82	-2.39
Banten	5,77	5,26	3,39
Jawa Barat	5,65	5,02	-2.52
Jawa Tengah	5,30	5,36	-2.56
DI Yogyakarta	6,20	6,59	2,68
Jawa Timur	5,47	5,53	2,33
Rata-Rata	5,75	5,95	2,8

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi di 6 Provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2018 hingga tahun 2020 relatif mengalami penurunan, paling tinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2018 yaitu sebanyak 6,20 persen. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah di Pulau Jawa berarti menunjukkan bahwa roda perekonomian di daerah tersebut berjalan sangat cepat banyak terjadi kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut yang berdampak terhadap pendapatan di daerah tersebut.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mendorong aktivitas perekonomian di Pulau Jawa, dengan meningkatkan aktivitas perekonomian maka mendorong perusahaan dalam memproduksi, dan semakin tinggi tingkat produksi, maka semakin tinggi pula kesempatan berkembang bagi perusahaan sehingga

perusahaan akan meningkatkan jumlah tenaga kerja. Tingkat pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Tingkat pertumbuhan ekonomi daerah melalui produk domestik regional bruto (PDRB). Yang meningkat, di harapkan dapat menyerap tenaga kerja di Pulau Jawa, karena dengan kenaikan PDRB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan PDRB suatu daerah dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran pada daerah di Pulau Jawa. Angka pengangguran yang rendah dapat mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Indikator ekonomi selanjutnya yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terdidik adalah upah minimum provinsi. Menurut Mankiw (2000), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik. Selain itu, upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan kepadanya. Masalah upah yang rendah dan secara langsung dan tidak langsung berpengaruh pada tingkat pengangguran terdidik yang tinggi. Hal tersebut disebabkan karena pertambahan tenaga kerja baru jauh lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang dapat disediakan setiap tahunnya. Penetapan tingkat upah yang dilakukan pemerintah pada suatu daerah akan memberikan pengaruh terhadap besarnya tingkat pengangguran yang ada. Semakin tinggi besaran upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada daerah tersebut. Upah atau balas karya tenaga

kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat.

Tinggi rendahnya upah atau gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang memberi taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan. Peningkatan pada upah minimum akan memiliki dampak yang buruk pada tenaga kerja sektor formal di perkotaan, kecuali pada pekerja „*white-collar*“. Jika peningkatan dalam upah minimum mengurangi pertumbuhan tenaga kerja pada sektor modern di bawah pertumbuhan pada populasi angkatan kerja, maka akan semakin banyak pekerja yang tidak terampil akan dipaksa untuk menerima upah yang lebih rendah dengan kondisi kerja yang buruk dalam sektor informal. Di samping itu, peningkatan upah juga dapat menyebabkan bertambahnya pengangguran karena perusahaan mengambil kebijakan efisiensi pekerja. Pada Tabel 1.3 ini dapat dilihat upah minimum provinsi antar Provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.3

Upah Minimum Provinsi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2020

(Rupiah/Tahun)

Nama Provinsi	2018	2019	2020
DKI Jakarta	3.648.036	3.940.973	4.267.349
Banten	2.099.385	2.267.990	2.460.996
Jawa Barat	1.544.361	1.668.373	1.810.351
Jawa Tengah	1.486.065	1.605.396	1.742.015
DI Yogyakarta	1.454.154	1.570.923	1.704.608
Jawa Timur	1.508.895	1.630.059	1.768.777
Jumlah	11.740.896	12.683.714	13.754.096

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) di 6 Provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2018 hingga 2020, relatif mengalami peningkatan. Kenaikan upah minimum provinsi akan menaikkan tingkat pengangguran terdidik karena untuk mengurangi karyawan apabila harus menaikkan tingkat upah, dengan adanya peningkatan upah dalam hal ini upah minimum, maka akan menambah biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja dapat dikurangi dengan mengurangi tenaga kerja dengan adanya efisiensi. Selain upah minimum provinsi faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terdidik adalah tingkat inflasi.

Inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya antara program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat. Inflasi kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus sepanjang waktu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan meluas (atau mengakibatkan kenaikan) kepada barang lainnya.

Phillips dalam Mankiw (2007) menggambarkan bagaimana hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa tingkat inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka akan memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka pengangguran berkurang.

Tabel 1.4

**Tingkat Inflasi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2020
(Persen/Tahun)**

Nama Provinsi	2018	2019	2020
DKI Jakarta	3.27	3.23	1.59
Banten	3.42	3.30	1.45
Jawa Barat	3.54	3.21	2.18
Jawa Tengah	2.82	2.81	1.56
DI Yogyakarta	2.66	2.77	1.40
Jawa Timur	2.86	2.12	1.44
Rata-Rata	3.09	2.90	1.60

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat bahwa Tingkat Inflasi yang paling tinggi pada tahun 2018 berada di Provinsi Jawa Barat sebesar 3.54 persen dan yang paling rendah berada di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 1.40 persen. Tingkat inflasi adalah naiknya harga-harga komoditi secara umum yang disebabkan oleh tidak sinkronnya program sistem pengadaan komoditi dengan tingkat pendapatan yang dimiliki oleh masyarakat.

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap tingkat pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah tingkat inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk

mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi.

Selain tingkat inflasi faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terdidik ialah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk penambahan kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri maupun investasi asing.

Harrod-Domar di dalam teorinya mengemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang tangguh atau *steady growth* dalam jangka panjang yaitu perlunya investasi. Investasi merupakan mobilisasi sumber daya untuk menciptakan atau menambah kapasitas produksi/pendapatan di masa yang akan datang. Investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber-sumber ekonomi yang diperlukan untuk menghasilkan output dan nilai tambah yang lebih besar, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan output.

Investasi atau biasa disebut dengan penanaman modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Investasi dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Investasi Penanaman Modal Asing (PMA). Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sendiri diartikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri atau pembelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang produksi, untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian yang berasal dari investasi dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing., baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Di sisi lain, Penanaman Modal Asing (PMA) sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan nilai *output* suatu daerah, mempercepat pembangunan ekonomi, dan membantu industrialisasi dalam membangun modal *overhead* ekonomi serta dalam menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Tabel 1.5

Investasi Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020

(Miliar Rupiah/Tahun)

Nama Provinsi	2019	2020
DKI Jakarta	119441,8	119498,9
Banten	46719,2	61381,2
Jawa Barat	131164,7	119015,7
Jawa Tengah	56569,5	49839,7
DI Yogyakarta	6502,1	2820,2
Jawa Timur	57514,1	77883,0
Jumlah	417911,4	430438,7

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, berisi tentang investasi seluruh provinsi di Pulau Jawa pada tahun 2019-2020 Tabel diatas menunjukkan investasi di Pulau Jawa mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 investasi paling tinggi berada pada Provinsi Jawa Barat sebesar 131164,7 Miliar Rupiah dan untuk tahun 2020 investasi paling tinggi berada Provinsi DKI Jakarta sebesar 119498,9 Miliar Rupiah dan untuk investasi paling rendah pada Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar 2820,2 Miliar Rupiah. Pertambahan barang dan modal dari investasi akan menambahkan kapasitas memproduksi di masa yang akan datang sehingga menstimulir pertumbuhan produksi nasional akan kesempatan kerja.

Selain dari investasi, faktor lain yang mempengaruhi pengangguran terdidik di Pulau Jawa yaitu kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu instansi. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Kebijakan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan kerja di setiap daerah yang berada pada Provinsi di Pulau Jawa, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah Provinsi Pulau Jawa. Penciptaan kesempatan kerja adalah langkah yang tepat, mengingat penawaran tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja yang lebih tinggi dari permintaannya. Kelebihan tenaga kerja ini biasanya merupakan tenaga kerja tidak ahli, sehingga perlu kiranya perluasan investasi pada proyek-proyek padat karya, bukan pada perkembangan sektor kapitalis dengan ciri utama padat modal sebagai hasil dari pilihan strategi pembangunan yang mendahulukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tabel 1.6

**Tingkat Kesempatan Kerja Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2018-2020
(Persen/Tahun)**

Nama Provinsi	2018	2019	2020
DKI Jakarta	93.7	93.8	89.0
Banten	91.5	91.8	89.3
Jawa Barat	91.8	92.1	89.5
Jawa Tengah	95.5	95.5	93.5
DI Yogyakarta	101.5	101.8	58.1
Jawa Timur	97.8	100.0	94.1
Rata-Rata	95.3	95.8	85.5

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.6 terlihat bahwa tingkat kesempatan kerja antar Provinsi di Pulau Jawa selama tahun 2018 hingga tahun 2020 relatif mengalami fluktuasi, paling tinggi terjadi di Provinsi DI Yogyakarta pada tahun 2019 yaitu sebanyak 101.8 persen dan untuk yang paling rendah tahun 2020 berada di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 58.1 persen. Kesempatan kerja bahwa besarnya kesiediaan usaha produksi untuk memperkerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, yang dapat berarti lapangan pekerjaan atau kesempatan yang tersedia untuk bekerja yang ada dari suatu saat dari kegiatan ekonomi.

Pada teori pertumbuhan neoklasik yang mana kualitas tenaga kerja digambarkan oleh tingginya pendidikan formal yang diperoleh. Hal tersebut sejalan dengan pendapat (Ashenfelter dan rouse, 2000). Mereka menyatakan

bahwa sekolah merupakan tempat yang menjanjikan yang dapat meningkatkan kemampuan (skill) serta pendapatan individu. Oleh sebab itu, kebijakan terkait pendidikan mempunyai potensi dapat mengurangi ataupun meningkatkan tingkat pengangguran terdidik.

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik adalah tingkat pendidikan, yang dilihat dari rata-rata lama sekolah antar Provinsi di Pulau Jawa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia adalah upaya meningkatkan kualitas manusia yang menyangkut pengembangan aktivitas dalam bidang pendidikan dan latihan. Pendidikan merupakan salah satu sarana dalam mengembangkan kecerdasan, kemampuan pengetahuan dan keterampilan, melalui pendidikan yang baik. Kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dapat lebih ditingkatkan, hal ini sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri, yaitu merubah sikap pengetahuan dan perilaku peserta pendidikan sesuai yang diharapkan.

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat pengangguran. Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kemampuan berfikir seseorang, karena di era global seperti ini persaingan semakin ketat diringi dengan kemajuan teknologi yang semakin tinggi. Banyaknya pengangguran lebih dikarenakan oleh kualitas pendidikan yang mereka peroleh tidak menjamin mereka untuk mendapat pekerjaan sesuai dengan jenjang pendidikan yang mereka jalani.

Dalam penelitian ini salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terdidik adalah tingkat pendidikan, yang dilihat dari rata-rata lama sekolah di Provinsi di Pulau Jawa.

Tabel 1.7

Tingkat Pendidikan Rata-Rata Lama Sekolah Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2019-2020 (Tahun)

Nama Provinsi	2019	2020
DKI Jakarta	11,06	11,13
Banten	8,74	8,89
Jawa Barat	8,37	8,55
Jawa Tengah	7,53	7,69
DI Yogyakarta	9,38	9,55
Jawa Timur	7,59	7,78
Rata-Rata	8,77	8,93

Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah)

Berdasarkan Tabel 1.7 terlihat bahwa tingkat pendidikan rata-rata lama sekolah antar Provinsi di Pulau Jawa rata-rata lama sekolah yang paling tinggi berada pada Provinsi DKI Jakarta. Kemudian diikuti oleh DI Yogyakarta. Sedangkan rata-rata lama sekolah paling rendah di Pulau Jawa terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Tetapi tabel diatas menunjukkan pada setiap Provinsi di Pulau Jawa mengalami peningkatan rata-rata lama sekolah, semakin banyak masyarakat yang mampu mengenyam pendidikan. Semakin tinggi tingkat

pendidikan maka semakin tinggi pula keahlian yang dimiliki, sehingga akan meningkatkan kontribusi tenaga kerja terhadap perekonomian.

Seperti teori *Human Capital* yang menyatakan bahwa seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan. Setiap tambahan satu tahun berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Menurut Sumarsono, kualitas tenaga kerja yang baik dapat dicerminkan oleh tingkat pendidikan merupakan proses kegiatan dalam menambah ilmu atau keahlian seseorang, sehingga dapat membentuk kepribadian dan kemandirian. Untuk dapat bekerja seseorang dituntut memiliki pendidikan sebagai modal dasar, karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pengetahuan/ketrampilan yang dimiliki, sehingga semakin tinggi pula kemampuan untuk bekerja. Dengan demikian pendidikan merupakan investasi masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengangguran.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan yang telah dijelaskan diatas maka menarik untuk mengamati masalah pengangguran terdidik dan mengkaji lebih dalam lagi kondisi tingkat pengangguran terdidik di 6 Provinsi di Pulau Jawa. Judul penelitian yang akan diangkat adalah **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran Terdidik Antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan tingkat pengangguran terdidik, tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan antar Provinsi di Pulau Jawa?
2. Bagaimana pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui perkembangan tingkat pengangguran terdidik, tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan antar Provinsi di Pulau Jawa?
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu ekonomi, khususnya ilmu Ekonomi Makro. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas baik dari sisi teori maupun praktiknya. Dengan adanya penelitian ini dapat memperoleh wawasan khususnya mengenai pengaruh tingkat pengangguran terdidik, tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan antar Provinsi di Pulau Jawa.

2. Bagi Praktisi Pemerintah

Untuk memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi pemerintah untuk mengevaluasi atau memperbaiki kinerjanya guna memperluas pengetahuan sehingga dapat dijadikan sebagai masukan untuk mengatasi dan mengurangi pengangguran.

3. Bagi Praktisi Masyarakat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menjadi masukan untuk mengurangi tingkat pengangguran terdidik.

4. Menjadi sumber referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka ini, penelitian akan menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan dengan masalah-masalah pengangguran. Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu tingkat pengangguran terdidik, tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan.

2.1.1 Tingkat Pengangguran Terdidik

Tingkat pengangguran terdidik merupakan pengangguran dari penduduk 15 tahun ke atas yang tingkat pendidikannya SMA-sederajat ke atas.

Menurut BPS (2009), pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SMA ke atas (sebagai kelompok terdidik) terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut. Selain itu, tingkat pengangguran terdidik yaitu angkatan kerja yang berpendidikan menengah ke atas (Diploma/Sarjana) dan tidak bekerja.

Tingkat pengangguran terdidik merupakan para pelajar yang sudah selesai pendidikan dan ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Pengangguran ini memiliki kaitan erat dengan pendidikan yang ada di Negara

berkembang, yang berkisar pada pandangan masyarakat. (Tobing, 2004). Di dasarkan pada kebijakan pemerintah tentang wajib belajar 9 tahun, maka golongan terdidik adalah golongan di mana telah menempuh kewajiban pendidikan dasar dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Di sejumlah negara berkembang terjadi hubungan positif antara pengangguran dan tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar kemungkinan untuk menganggur. Penyebab dari situasi ini adalah bahwa mereka yang tidak terdidik tidak akan dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka kalau tidak bekerja, sehingga mereka mau melakukan apa saja untuk memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar tersebut, meskipun hanya bekerja secara terbatas. Sedangkan bagi yang bisa memperoleh pendidikan lanjutan, mereka hanya mau bekerja kalau pekerjaan itu memberi uang, status, atau kepuasan yang relatif tinggi (Todaro, 2000).

2.1.1.1 Penyebab Terjadinya Tingkat Pengangguran Terdidik

Kecenderungan meningkatnya angka pengangguran terdidik disebabkan bahwa semakin tinggi pendidikan akan makin tinggi pula aspirasi untuk mendapatkan kedudukan atau kesempatan kerja yang lebih sesuai (Mauled Moelyono dalam Sutomo et al, 1999:223).

Meningkatnya tingkat pengangguran terdidik yaitu disebabkan oleh:

1. Ketidacocokan antara karakteristik lulusan baru yang memasuki dunia kerja dengan kesempatan kerja yang tersedia.

2. Semakin terdidik seseorang, semakin besar harapannya pada jenis pekerjaan yang aman, dengan demikian angkatan kerja terdidik lebih suka memilih menganggur dari pada mendapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka.
3. Terbatasnya daya serap tenaga kerja sektor formal sementara angkatan kerja terdidik cenderung memasuki sector formal yang kurang beresiko.
4. Belum efisiensinya fungsi pasar tenaga kerja (Elwin Tobing dalam Sudarwan Danim, 2003:65).

2.1.1.2 Dampak Tingkat Pengangguran Terdidik

Dampak tingkat pengangguran terhadap perekonomian menurut Sumarsono (2009:260), ada dua aspek ekonomi yaitu:

A. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara

Tujuan akhir pembangunan ekonomi suatu negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus, jika tingkat pengangguran di suatu negara relatif tinggi hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi yang telah dicita-citakan. Hal ini terjadi karena pengangguran berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian. Dampak negatif pengangguran terhadap kegiatan perekonomian adalah sebagai berikut.

1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Hal ini terjadi karena pengangguran

bisa menyebabkan pendapatan nasional riil (nyata) yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensial (pendapatan yang seharusnya). Oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah

2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Hal ini terjadi karena pengangguran yang tinggi akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah juga akan berkurang sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menerus.
 3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor (pengusaha) untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak terpacu.
- B. Dampak negatif pengangguran terhadap individu yang mengalaminya dan masyarakat pada umumnya adalah sebagai berikut :
1. Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian.
 2. Pengangguran dapat menghilangkan ketrampilan.
 3. Pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik.

2.1.2 Teori Ketenagakerjaan

Terdapat beberapa teori penting dalam kaitanya dengan masalah ketenagakerjaan. Adapun teori-teori tersebut antara lain:

2.1.2.1 Teori Klasik Adam Smith

Adam Smith (1729-1790) merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran klasik. Dalam hal ini teori Klasik Adam Smith juga melihat bahwa alokasi sumber daya manusia yang efektif adalah pemula pertumbuhan ekonomi. Setelah ekonomi tumbuh, akumulasi modal (fisik) baru mukai dibutuhkan untuk menjaga agar ekonomi tumbuh. Dengan kata lain, alokasi sumber daya manusia yang efektif merupakan syarat perlu (*necessary condition*) bagi pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.2 Teori Malthus

Sesudah Adam Smith, Thomas Robert Malthus (1766-1834) dianggap sebagai pemikir klasik yang sangat berjasa dalam pengembangan pemikiran- pemikiran ekonomi. Thomas Robert Malthus mengungkapkan bahwa manusia berkembang jauh lebih cepat dibandingkan dengan produksi hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia berkembang sesuai dengan deret ukur, sedangkan produksi makanan hanya meningkat sesuai dengan deret hitung.

Malthus juga berpendapat bahwa jumlah penduduk yang tinggi pasti mengakibatkan turunya produksi perkepala dan satu-satunya cara untuk menghindari hal tersebut adalah melakukan kontrol atau pengawasan pertumbuhan penduduk. Beberapa jalan keluar yang ditawarkan oleh Malthus

adalah dengan menunda usia perkawinan dan mengurangi jumlah anak. Jika hal ini tidak dilakukan maka pengurangan penduduk akan diselesaikan secara alamiah antara lain akan timbul perang, epidemi, kekurangan pangan dan sebagainya.

2.1.2.3 Teori Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946) berpendapat bahwa dalam kenyataan pasar tenaga kerja tidak bekerja sesuai dengan pandangan klasik. Dimanapun para pekerja mempunyai semacam serikat kerja (*labor union*) yang akan berusaha memperjuangkan kepentingan buruh dari penurunan tingkat upah. Kalaupun tingkat upah diturunkan tetapi kemungkinan ini dinilai Keynes kecil sekali, tingkat pendapatan masyarakat tentu akan turun. Turunya pendapatan sebagian anggota masyarakat akan menyebabkan turunya daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan menyebabkan konsumsi secara keseluruhan berkurang. Berkurangnya daya beli masyarakat akan mendorong turunya harga-harga.

2.1.2.4 Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar (1946) dikenal sebagai teori pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini investasi tidak hanya menciptakan permintaan, akan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang membesar membutuhkan permintaan yang lebih besar pula agar produksi tidak menurun. Jika kapasitas yang membesar tidak diikuti dengan permintaan yang besar, surplus akan muncul dan disusul penurunan jumlah produksi.

2.1.3 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara singkat merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pengertian ini menekankan pada tiga hal yaitu proses, output per kapita dan jangka panjang. Proses menggambarkan perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu yang lebih bersifat dinamis, output perkapita mengaitkan aspek output total (GDP) dan aspek jumlah penduduk, sedangkan jangka panjang menunjukkan kecenderungan perubahan perekonomian dalam jangka panjang tertentu yang didorong oleh proses intern perekonomian.

Tingkat pertumbuhan ekonomi juga diartikan secara sederhana sebagai kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih kecil atau lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk atau apakah diikuti oleh pertumbuhan struktur perekonomian atau tidak. Menurut ekonomi Klasik Adam Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor utama yakni pertumbuhan output total dan pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh produktivitas sektor-sektor dalam menggunakan faktor-faktor produksinya. Produktivitas dapat ditingkatkan melalui berbagai sarana pendidikan, pelatihan dan manajemen yang lebih baik.

Indikator Pertumbuhan ekonomi Menurut Sukirno (2008:423), bahwa dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fiskal produk barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti penambahan produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah

untuk memberikan gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Untuk melihat tingkat pertumbuhan ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun sehingga dapat diformulasikan. melihat tingkat pertumbuhan ekonomi regional harus dibandingkan dengan tingkat pendapatan regional dari tahun ke tahun sehingga dapat diformulasikan.

$$g_t = \frac{\Delta \text{PDRB}}{\text{PDRB}}$$

Dimana:

g_t = Pertumbuhan Ekonomi

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

Δ = Perubahan

2.1.3.1 Teori-Teori Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik ada empat faktor yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, seperti tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Dalam teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan kepada pemisalan ini selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh penambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan.

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlangsung. Pada permulaannya, apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi. Maka para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Apabila penduduk sudah terlalu banyak pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif. Maka kemakmuran masyarakat menurun kembali. Ekonomi akan mencapai tingkat perkembangan yang sangat rendah. Apabila keadaan ini dicapai, ekonomi dikatakan telah mencapai keadaan tidak berkembang (subsistence). Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi Klasik setiap masyarakat tidak akan mampu menghalangi terjadinya keadaan tidak berkembang tersebut.

Mengenai teori pertumbuhan Klasik telah dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produksi marjinal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Maka penambahan penduduk akan menaikkan pendapatan per kapita. Akan tetapi apabila penduduk sudah semakin banyak, hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu

produksi marginal akan mulai mengalami penurunan. Oleh karenanya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya.

Penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pada suatu jumlah penduduk yang tertentu produksi marginal telah sama dengan pendapatan per kapita. Pada keadaan ini pendapatan per kapita mencapai nilai yang maksimum. Jumlah penduduk pada waktu itu dinamakan penduduk optimum. Secara grafik teori penduduk optimum dapat ditunjukkan.

2. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori itu ditunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi ini akan memerlukan investasi baru.

Di dalam mengemukakan teori pertumbuhannya Schumpeter memulai analisisannya dengan memisalkan bahwa perekonomian sedang dalam keadaan tidak berkembang. Tetapi keadaan ini tidak berlangsung lama. Pada waktu keadaan tersebut berlaku, segolongan pengusaha menyadari tentang berbagai kemungkinan untuk mengadakan inovasi yang menguntungkan. Didorong oleh keinginan mendapatkan keuntungan dari mengadakan pembaharuan tersebut, mereka akan meminjam modal dan melakukan penanaman modal. Investasi yang baru ini akan meninggikan tingkat kegiatan ekonomi negara. Maka pendapatan masyarakat akan bertambah dan seterusnya konsumsi masyarakat menjadi

bertambah tinggi. Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk menghasilkan lebih banyak barang dan melakukan penanaman modal baru. Maka menurut Schumpeter, investasi dapat dibedakan kepada dua golongan, penanaman modal otonomi dan penanaman modal terpengaruh. Penanaman modal otonomi adalah penanaman modal yang ditimbulkan oleh kegiatan ekonomi yang timbul sebagai akibat kegiatan inovasi.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya, pada akhirnya akan tercapai tingkat "keadaan tidak berkembang" atau "*stationary state*". Akan tetapi, berbeda dengan pandangan Klasik, dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Pandangan ini berbeda dengan Klasik. Seperti telah diterangkan, menurut pandangan Klasik tingkat tersebut dicapai pada waktu perekonomian telah berada kembali pada tingkat pendapatan subsisten, yaitu pada tingkat pendapatan yang sangat rendah.

3. Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Teori Harrod-Domar ini menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang. Dengan kata lain, teori ini berusaha menunjukkan syarat yang dibutuhkan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dengan baik.

Menurut Harrod-Domar, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk menggantikan barang-barang modal (gedung-gedung, peralatan, material) yang rusak. Namun demikian, untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Jika kita menganggap bahwa ada hubungan ekonomi secara langsung antara besarnya stok modal (K) dan output total (Y), misalnya jika 3 rupiah modal diperlukan untuk menghasilkan (kenaikan) output total sebesar 1 rupiah, maka setiap tambahan bersih terhadap stok modal (investasi baru) akan mengakibatkan kenaikan output total sesuai dengan rasio modal-output tersebut.

4. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-Klasik melihat dari sudut pandangnya yang berbeda, yaitu dari segi penawaran menurut teori ini, yang dikembangkan oleh Abramovits dan Solow pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi. Dalam persamaan, pandangan ini dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Dimana:

ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi.

ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal.

ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk.

ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi.

Analisis Solow selanjutnya membentuk formula matematika untuk persamaan itu dan seterusnya membuat pembuktian secara kajian empiris untuk menunjukkan kesimpulan berikut: *faktor terpenting yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi bukanlah pertambahan modal dan pertambahan tenaga kerja. Faktor yang paling penting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja.*

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik bukanlah dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi . dalam penyelidikan mereka Abramovits dan Solow menunjukkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat terutama disebabkan oleh perkembangan teknologi. Di antara 80 hingga 90 persen dari pertumbuhan ekonomi yang berlaku di Amerika Serikat diantara pertengahan abad ke-19 dan ke-20 disebabkan oleh perkembangan teknologi.

Setelah itu beberapa ahli ekonomi lain melakukan penyelidikan yang sama sifatnya. Salah satu studi yang terkenal adalah dilakukan oleh Denison yang menganalisis faktor yang mengakibatkan perkembangan di negara maju di antara tahun 1950-1962. Kesimpulan kajian tersebut adalah pertambahan barang-barang modal hanya mewujudkan 25 persen dari pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat, 18 persen dari pertumbuhan ekonomi di Eropa Barat dan 21 persen dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Inggris. Dengan kata lain studi Denison

menunjukkan bahwa bukan modal, tetapi teknologi dan perkembangan keterampilan yang menjadi faktor utama yang mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

2.1.3.2 Faktor Penentu Tingkat Pertumbuhan Ekonomi

Dua hal esensial harus dilakukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi adalah, pertama sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tidak boleh ada sumber-sumber yang menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertumbuhannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sumber-Sumber Alam

Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral dan tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam, sedikitnya sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia maka kendala sumber alam lebih serius.

2. Sumber-Sumber Tenaga Kerja

Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendayagunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah.

3. Kualitas Tenaga Kerja yang Rendah

Negara-negara sedang berkembang tak mampu mengadakan investasi yang memadai untuk menaikkan kualitas sumber daya manusia berupa pengeluaran.

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi (Sumarsono, 2009:181). Sedangkan menurut Gilarso (2001:211), upah disebut juga relatif balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, per hari, minggu, bulan atau tahun.

Penetapan upah minimum provinsi tersebut diarahkan kepada pencapaian kebutuhan kehidupan yang layak dan ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pegupahan Provinsi dan atau Bupati/Walikota (Pasal 89 UU No. 13/2003). *Efficiency Wage Theory* menyatakan bahwa upah yang tinggi dapat mendorong para pekerja untuk giat bekerja (meningkatkan produktivitas). Para ekonom berpendapat bahwa dengan pendapatan yang tinggi maka pekerja akan membeli makanan yang lebih bergizi untuk menambah energinya (negara miskin), sehingga produktivitasnya bertambah (Sumarsono, 2003).

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja/buruh dalam bentuk uang yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan melalui sebuah perjanjian kerja. Pengertian upah dapat dilihat dari dua pihak. Pertama pihak pengusaha, upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik atau mental yang disediakan oleh tenaga kerja. Kedua pihak tenaga kerja, upah merupakan imbalan jasa fisik atau mental yang

diberikan pada pengusaha. Dari pengertian tersebut maka upah berperan penting dalam menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Upah tenaga kerja dibedakan atas dua jenis, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja. Perusahaan akan menambah tenaga kerja apabila tenaga kerja tersebut dapat meningkatkan nilai tambah.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa upah merupakan hak yang diterima oleh pekerja/buruh dalam bentuk uang yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja yang ditetapkan melalui sebuah perjanjian kerja. Pengertian upah dapat dilihat dari dua pihak. Pertama pihak pengusaha, upah merupakan pembayaran atas jasa-jasa fisik atau mental yang disediakan oleh tenaga kerja. Kedua pihak tenaga kerja, upah merupakan imbalan jasa fisik atau mental yang diberikan pada pengusaha. Dari pengertian tersebut maka upah berperan penting dalam menentukan permintaan dan penawaran tenaga kerja.

Upah tenaga kerja dibedakan atas dua jenis, yaitu upah uang dan upah riil. Upah uang adalah jumlah uang yang diterima pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

perjanjian kerja. Perusahaan akan menambah tenaga kerja apabila tenaga kerja tersebut dapat meningkatkan nilai tambah.

$$\text{VMPPL} = \text{MPPL} \times \text{P}$$

Dimana:

VMPPL = Value Marginal Physical Product of Labor

MPPL = Marginal Physical Product of Labor

P = Harga Jual Barang yang diproduksi

2.1.4.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Upah Minimum

Faktor-faktor yang mempengaruhi upah minimum menurut Payaman Simanjuntak ialah:

1. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja

Upah cenderung tinggi bagi pekerja yang jumlahnya terbatas sedangkan permintaannya banyak, misalnya pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan skill tinggi, penawaran tenaga kerja rendah dan jumlah tenaga kerja langka, maka tingkat upah cenderung tinggi dan begitu pula sebaliknya.

2. Organisasi Pekerja

Adanya serikat pekerja yang kuat maka posisi bergaining juga kuat sehingga akan menaikkan tingkat upah.

3. Kemampuan Untuk Membayar

Bagi perusahaan, upah merupakan salah satu komponen biaya produksi, semakin tinggi upah pekerja akan semakin tinggi biaya produksi sehingga mengurangi keuntungan perusahaan. Jika biaya produksi tinggi sementara hasil produksi rendah menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar lebih tinggi upah para pekerjanya.

4. Produktivitas

Semakin tinggi produktivitas kerja akan mengurangi biaya produksi dan menambah keuntungan perusahaan sehingga upah yang diterima pekerja juga semakin tinggi. Produktivitas juga menunjukkan prestasi kerja.

5. Biaya Hidup

Di kota-kota besar biaya hidup cenderung tinggi sedangkan di daerah adalah sebaliknya. Biaya hidup merupakan batas penerimaan upah para pekerja.

6. Kebutuhan Hidup

Semakin tinggi kebutuhan hidup mengakibatkan upah cenderung tinggi dan sebaliknya.

7. Kebijakan Pemerintah

Pemerintah melalui peraturan perundangan turut mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat upah. Misalnya, melalui penetapan upah minimum.

2.1.4.2 Hubungan Upah Minimum Provinsi dengan Tingkat Pengangguran

Terdidik

Kenaikan tingkat upah minimum provinsi akan menyebabkan terjadinya kenaikan biaya produksi perusahaan. Kenaikan biaya produksi ini tentunya akan berdampak terhadap peningkatan harga output sehingga menyebabkan permintaan

terhadap output menurun. Dengan demikian adanya kenaikan upah minimum ini akan menyebabkan perusahaan-perusahaan menurunkan permintaannya terhadap tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran terdidik meningkat. Sebaliknya apabila upah minimum mengalami penurunan maka biaya produksi perusahaan juga akan mengalami penurunan. Penurunan biaya produksi ini akan menurunkan harga output sehingga permintaan terhadap output meningkat dan keuntungan perusahaan ikut meningkat. Kondisi ini tentunya akan mendorong permintaan tenaga kerja sehingga tingkat pengangguran menurun. Atau dengan kata lain apabila upah minimum meningkat maka biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan semakin meningkat sehingga perusahaan merespon hal tersebut dengan melakukan inefisiensi pada perusahaan. Kebijakan yang diambil adalah pengangguran tenaga kerja guna mengurangi biaya-biaya produksi, sehingga hal ini terjadi PHK dan pengangguran terdidik bertambah.

2.1.5 Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi merupakan proses meningkatnya harga barang dalam perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lain dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain (Sukirno, 2008).

Biaya hidup setiap konsumen bergantung pada harga barang dan jasa. Tingkat inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus menerus. Dari definisi ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan telah terjadi inflasi. Pertama adanya kenaikan harga barang dan jasa, kedua kenaikan tersebut terjadi terhadap harga-harga barang dan jasa secara umum. Ketika kenaikan harga tersebut berlangsung cukup lama dengan demikian

kenaikan harga yang terjadi pada suatu jenis barang dan jasa, atau kenaikan yang terjadi hanya sementara waktu tidak dapat disebut dengan tingkat inflasi.

Pandangan kaum moneteris menganggap inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar yang terlalu banyak, sehingga daya beli uang (*Purchasing power of money*) tersebut menurun. Sebagai akibatnya, harga barang-barang menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural, seperti masalah gagal panen yang menyebabkan kekurangan persediaan barang, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan.

Inflasi akan menjatuhkan harga saham di pasar. Sedangkan inflasi yang lemah dapat berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi dan akhirnya harga saham akan bergerak dengan lambat (Samsul, 2006).

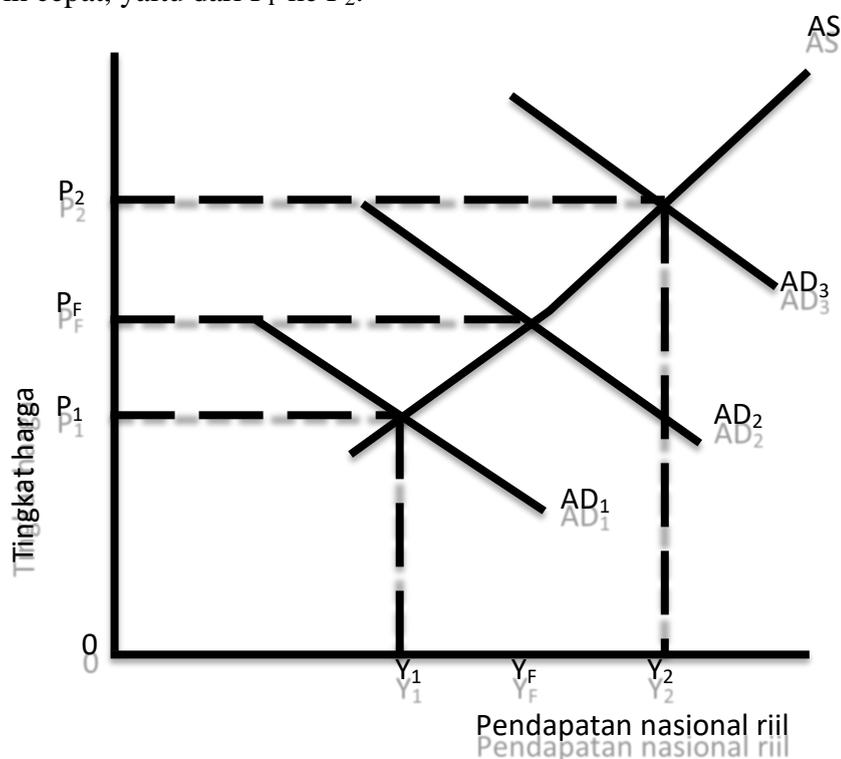
2.1.5.1 Jenis-Jenis Tingkat Inflasi

Berdasarkan kepada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, tingkat inflasi biasanya dibedakan kepada tiga bentuk berikut:

1. Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Pada gambar dibawah ini dapat digunakan untuk menerangkan wujudnya inflasi tarikan permintaan. Kurva AS adalah penawaran

agregat dalam ekonomi, sedangkan AD_1 , AD_2 , dan AD_3 adalah permintaan agregat. Misalkan pada mulanya permintaan agregat adalah AD_1 . Maka pendapatan nasional adalah Y_1 dan tingkat harga adalah P_1 . Perekonomian yang berkembang pesat mendorong kepada kenaikan permintaan agregat, yaitu menjadi AD_2 . Akibatnya pendapatan nasional mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, yaitu Y_F dan tingkat harga naik dari P_1 ke P_F . Ini berarti inflasi telah wujud, apabila masyarakat masih tetap menambah pengeluarannya maka permintaan agregat menjadi AD_3 . Untuk memenuhi permintaan yang semakin bertambah tersebut, perusahaan-perusahaan akan menambah produksinya dan menyebabkan pendapatan nasional riil meningkat dari Y_F menjadi Y_2 . Kenaikan produksi nasional melebihi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan kenaikan harga yang lebih cepat, yaitu dari P_F ke P_2 .

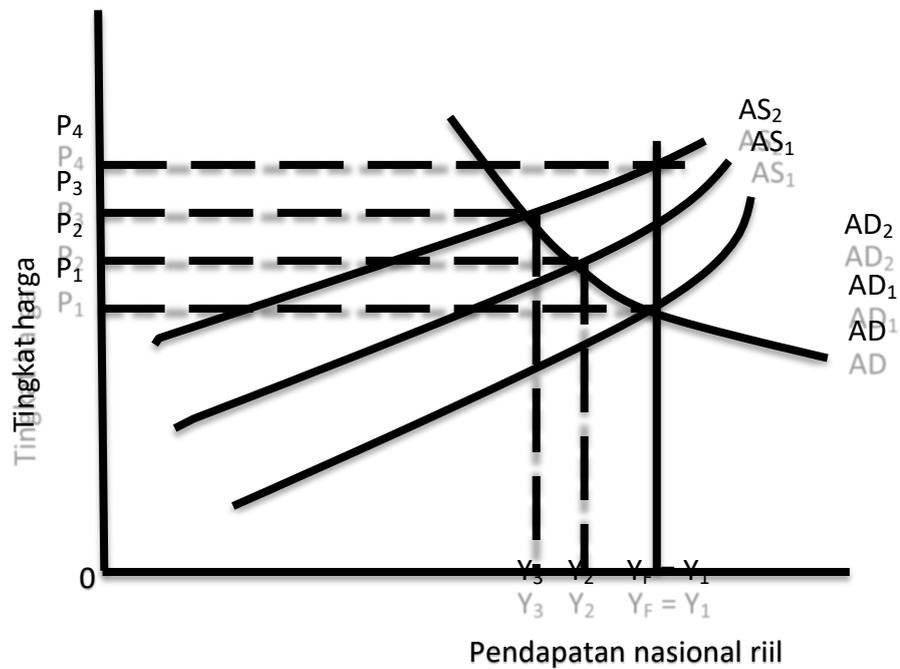


Gambar 2.1
Inflasi Tarikan Permintaan

Di samping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik terus-menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

2. Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.



Gambar 2.2

Inflasi Desakan Biaya

Inflasi desakan biaya dapat di terangkan dengan menggunakan Gambar 2.2. Kurva AS_1 , AS_2 dan AS_3 adalah kurva penawaran agregat, sedangkan kurva AD adalah kurva permintaan agregat. Andaikan pada mulanya kurva penawaran agregat adalah AS_1 . Dengan demikian pada mulanya keseimbangan ekonomi negara tercapai pada pendapatan nasional Y_1 , yaitu pendapatan nasional pada kesempatan kerja penuh, dan tingkat harga adalah pada P_1 , yaitu pendapatan nasiona pada kesempatan kerja yang tinggi perusahaan-perusahaan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji. Dan usaha untuk

memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi.

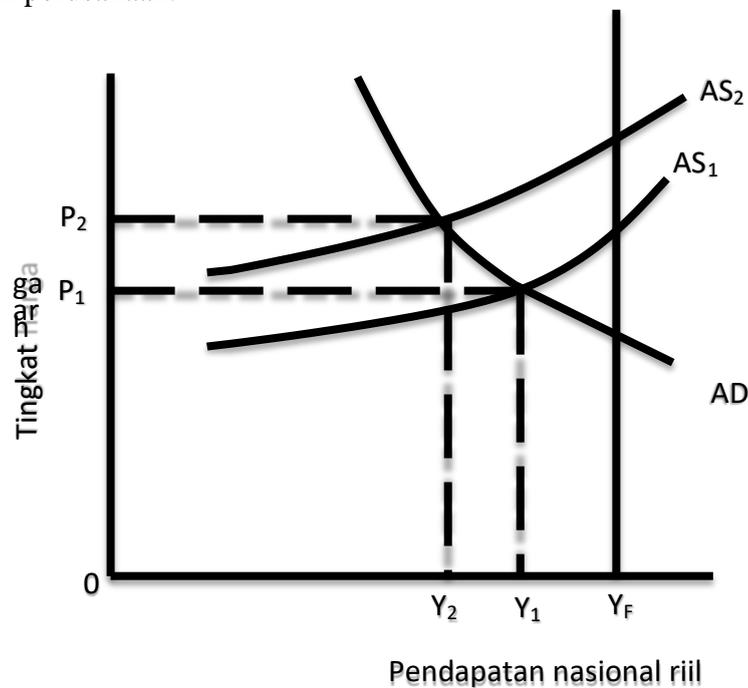
Kenaikan upah akan menaikkan biaya, dan kenaikan biaya akan memindahkan fungsi penawaran agregat ke atas, yaitu dari AS_1 menjadi AS_2 . Sebagai akibatnya tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2 . Harga barang yang tinggi ini mendorong para pekerja menuntut kenaikan upah lagi, maka biaya produksi akan semakin tinggi. Pada akhirnya ini akan menyebabkan kurva penawaran agregat bergeser dari AS_2 menjadi AS_3 . Perpindahan ini menaikkan harga dari P_2 ke P_3 . Dalam proses kenaikan harga yang disebabkan oleh kenaikan upah dan kenaikan penawaran agregat ini pendapatan nasional riil terus mengalami penurunan, yaitu dari Y_F (atau Y_1) menjadi Y_2 dan Y_3 . Berarti akibat dari kenaikan upah tersebut kegiatan ekonomi akan menurun di bawah tingkat kesempatan kerja penuh.

Dalam analisis di atas diandaikan kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan dalam permintaan agregat riil. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS_1 menjadi AS_2 permintaan agregat AD akan berubah menjadi AD_1 . Akibat dari perubahan ini kesempatan kerja penuh tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P_2 . Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, penawaran agregat akan bergerak dari AS_2 ke AS_3 . Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD_2 maka

tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai, tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P_3 yaitu menjadi P_4 .

3. Inflasi Diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.



Gambar 2.3
Inflasi Diimpor dan Stagflasi

Wujudnya stagflasi sebagai akibat inflasi diimpor dan penurunan nilai mata uang seperti yang diterangkan di atas dapat digambarkan secara grafik, yaitu seperti ditunjukkan dalam Gambar 2.3. permintaan agregat dalam ekonomi adalah AD sedangkan pada mulanya penawaran agregat adalah AS_1 . Dengan demikian

pada mulanya pendapatan nasional adalah Y_1 . Gambar 2.3 menunjukkan pendapatam ini dicapai di bawah pendapatan pada kesempatan kerja penuh (Y_1) maka jumlah penganggurn adalah tinggi. Kenaikan harga barang impor yang penting artinya di berbagai industri menyebabkan biaya produksi naik, dan ini seterusnya akan mengakibatkan perpindahan kurva agregat dari AS_1 menjadi AS_2 . Pendapatan menurun dari Y_1 kepada Y_2 sedangkan tingkat harga naik dari P_1 menjadi P_2 . Ini berarti secara serentak perekonomian menghadapi masalah seperti ini dengan istilah stagflasi, yaitu istilah yang bersmuber dari kata “*stagnation*” dan “*inflation*” dengan demikian stagflasi menggambarkan keadaan di mana kegiatan ekonomi semakin menurun, pengangguran semakin tinggi dan pada waktu yang sama proses kenaikan harga-harga semain bertambah cepat.

2.1.5.2 Dampak Tingkat Inflasi

Tingkat inflasi memiliki dampak positif maupun negatif terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Dampak positif tingkat inflasi diantaranya menyebabkan peredaran dan perputaran barang lebih cepat sehingga produksi barang-barang bertambah, kesempatan kerja bertambah karena terjadi tambahan investasi yang berarti membuka lapangan kerja sehingga mengurangi masalah pengangguran. Dampak positif tersebut bisa terjadi ketika inflasi terkendali dan diikuti dengan pendapatan nominal masyarakat yang bertambah, sehingga pendapatan riil meningkat. Sebaliknya, ketika tingkat inflasi tinggi dan tidak diikuti dengan penambahan pendapatan masyarakat maka dampak negatif akan dijumpai. Diantaranya banyak proyek pembangunan macet, menurunnya minat menabung

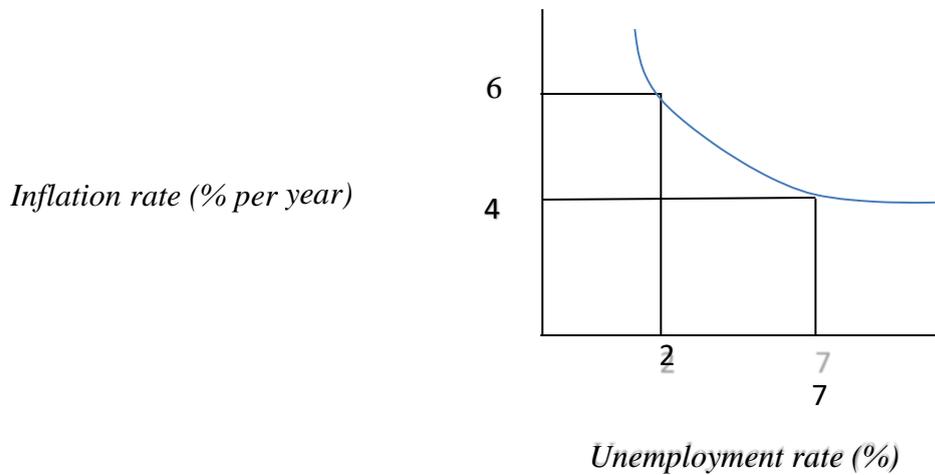
masyarakat akibat turunya nilai mata uang yang dapat mengancam perbankan nasional.

Tingkat inflasi dapat menimbulkan beberapa akibat buruk baik terhadap orang per orang, masyarakat, maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Karena itulah berbagai upaya yang dilakukan terutama oleh pemerintah dengan senantiasa mencari jalan untuk menghindari atau mengatasinya. Inflasi yang tinggi tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik mengakibatkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Pemilik modal akan mengalihkan uang yang ia miliki untuk tujuan spekulasi, misalnya membeli tanah, rumah atau lainnya, sehingga investasi produktif akan berkurang, akibatnya kegiatan perekonomian menurun dan terjadi pengangguran. Salah satu akibatnya yaitu inflasi cenderung menurunkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Para pelaku ekonomi seperti para pekerja yang bergaji tetap. Inflasi biasanya berjalan lebih cepat dari pada kenaikan upah para pekerja. Upah riil para pekerja akan merosot disebabkan oleh inflasi, dan ini berarti tingkat kesejahteraan/kemakmuran sebagian besar masyarakat dengan sendirinya akan turut merosot. Jadi dampak buruk inflasi tersebut individu dan masyarakat yaitu menurunkan pendapatan riil bagi orang-orang yang berpendapatan tetap, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang dan memperburuk pembagian kekayaan atau memperlebar jurang distribusi antar golongan pendapatan.

2.1.5.3 Hubungan Tingkat Inflasi dengan Tingkat Pengangguran

Tingkat inflasi mempunyai hubungan positif atau negatif terhadap jumlah pengangguran. Apabila tingkat inflasi yang dihitung adalah inflasi yang terjadi pada harga-harga secara umum, maka tingginya tingkat inflasi yang terjadi akan berakibat pada peningkatan pada tingkat bunga (pinjaman). Oleh karena itu, dengan tingkat bunga yang tinggi akan mengurangi investasi untuk mengembangkan sektor-sektor yang produktif. Hal ini akan berpengaruh pada jumlah pengangguran yang tinggi karena rendahnya kesempatan kerja sebagai akibat dari rendahnya investasi (Sukirno, 2002).

Dengan adanya kecenderungan bahwa tingkat inflasi dan pengangguran kedudukannya naik (tidak ada *trade off*) maka menunjukkan bahwa adanya perbedaan dengan kurva phillips dimana terjadi trade off antara inflasi yang rendah atau pengangguran yang rendah. Jika tingkat inflasi yang diinginkan adalah rendah, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Sebaliknya, jika inflasi yang diinginkan tinggi, maka akan terjadi tingkat pengangguran yang relatif rendah.



Sumber : Alghofari, 2010

Gambar 2.4
Kurva Phillips

Kurva Phillips menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, berdasarkan teori permintaan, permintaan akan naik, kemudian harga akan naik pula. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja, maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) pengangguran menjadi berkurang.

2.1.6 Investasi

Teori ekonomi mengartikan atau mendefinisikan investasi sebagai pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang. Dengan perkataan lain, investasi berarti kegiatan perbelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi sesuatu perekonomian (Sukirno, 2009).

Menurut Samuelson (2011), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang disuatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Menurut UU No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri (PMDN). Maupun penanaman modal asing (PMA). Untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal terbagi menjadi dua bagian, yaitu penanaman modal dalam negeri (PMDN), dan penanaman modal asing (PMA). Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri (PMA) dengan menggunakan modal dalam negeri (PMDN). Sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

2.1.6.1 Manfaat Investasi

Menurut Noor (2015:47), manfaat investasi yaitu :

1) Investasi yang bermanfaat untuk umum (publik)

Pada dasarnya, hampir semua bentuk investasi bermanfaat bagi kepentingan publik atau umum karena investasi menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Investasi juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Contohnya adalah investasi di bidang infrastruktur (jalan, jembatan, pelabuhan, pasar dan sebagainya), dan investasi lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Investasi yang bermanfaat untuk kelompok tertentu pribadi atau rumah tangga.

Investasi yang bermanfaat untuk kelompok seperti investasi di bidang olahraga, sedangkan investasi yang bermanfaat untuk rumah tangga seperti investasi untuk usaha (mendapat penghasilan), investasi untuk pendidikan, investasi untuk perumahan, dan investasi lain yang bermanfaat untuk pribadi atau keluarga.

2.1.6.2 Jenis-Jenis Investasi

Menurut Noor (2015 : 252), menurut jenisnya investasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu:

- a. Investasi langsung (*direct investment*), adalah investasi pada faktor produksi yang menghasilkan aneka barang dan jasa untuk keperluan konsumsi masyarakat, atau dikenal juga dengan investasi pada sektor riil
- b. Investasi tidak langsung (*indirect investment*), adalah investasi yang bukan pada faktor produksi, melainkan pada sektor keuangan (*financial investment*), seperti deposito, beli saham, obligasi, dan sejenisnya, yang menghasilkan jasa keuangan, seperti deposito, beli saham, beli obligasi, reksadana, sertifikat Bank Indonesia (SB), Surat Utang Negara (SUN), dan investasi pada surat berharga lainnya.

Menurut Mankiw (2006:447-493), investasi berdasarkan penggunaannya dapat dibedakan menjadi tiga bentuk, yaitu:

1. Investasi tetap bisnis, berupa pengeluaran untuk membeli peralatan dan struktur yang digunakan untuk proses produksi
2. Investasi residensial, berupa pembelian rumah untuk tempat tinggal atau disewakan.
3. Investasi persediaan, berupa barang-barang perusahaan yang disimpan di gudang, termasuk bahan-bahan dan perlengkapan, barang setengah jadi dan barang jadi.

2.1.7 Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja merupakan sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan (Sukirno, 2008).

Tingkat kesempatan kerja mengandung pengertian lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk bekerja, yang ada dari suatu kegiatan ekonomi (produksi). Dengan demikian kesempatan kerja adalah lapangan pekerjaan yang sudah diduduki dan masih lowong. Dari lapangan pekerjaan yang masih lowong tersebut (yang mengandung arti adanya kesempatan), kemudian timbul kebutuhan akan tenaga kerja. Kebutuhan tenaga kerja nyata-nyata diperlukan oleh perusahaan/lembaga menerima tenaga kerja pada tingkat upah, posisi dan syarat kerja tertentu.

Menurut (Tandiawan 2012). Kesempatan kerja merupakan salah satu aspek penting karena sejalan dengan teori klasik yang menyatakan adanya trade off antara efisiensi produktifitas dan kesempatan kerja. Menurut BPS kesempatan kerja dapat dilihat melalui perthitungan berikut:

$$\text{TKK} = - \times 100\%$$

Keterangan:

TKK = Tingkat Kesempatan Kerja

a = Jumlah Penduduk Bekerja

b = Jumlah Angkatan Kerja

2.1.7.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kesempatan Kerja

Tingkat kesempatan kerja terkait dengan kehidupan ekonomi yang selalu dinamis, dimana kegiatan-kegiatan yang baru timbul, ada yang maju berkembang, meningkat, berpindah dan ada pula yang mundur dan hilang. Pergerakan dan

perubahan-perubahan tersebut merupakan proses simultan atau sering diistilahkan dinamika.

Kebijakan perluasan kesempatan kerja erat hubungannya dengan kebijaksanaan kependudukan. Secara umum penyediaan (penawaran) tenaga kerja dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (Sumarsono, 2003:41).

1. Jumlah Penduduk

Semakin tinggi jumlah penduduk maka tenaga kerja dan angkatan kerja akan meningkat sehingga akan mengurangi kesempatan orang untuk bekerja.

2. Tenaga Kerja

Tidak semua tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja siap untuk bekerja, karena sebagian masih dalam usia sekolah, mengurus rumah tangga dan golongan lainnya. Keadaan ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah orang yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka semakin kecil penyediaan tenaga kerja.

3. Perkembangan Ekonomi

Pastinya perekonomian suatu daerah mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi, artinya banyak perusahaan yang menambah tenaga kerja baru.

2.1.8 Tingkat Pendidikan

Berdasarkan catatan sejarah, paradigma pembangunan ekonomi berdimensi manusia telah mampu berkembang meskipun sebuah negara tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Faktor produksi total dapat ditingkatkan dengan adanya penekanan pada investasi manusia. Faktor produksi fisik seperti tanah dan modal bisa saja mengalami deminishing return tetapi ilmu pengetahuan

tidak. Robert M. Solow menekankan pada peranan ilmu pengetahuan sebagai investasi modal sumber daya manusia dalam memacu pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut menurut Solow Tilaar (2000), ada tiga faktor penyebab mengapa pendidikan perlu dalam usaha membangun perekonomian, yaitu: Pendidikan yang lebih tinggi memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka. Hal ini memungkinkan masyarakat dapat berpikir secara rasional dalam bertindak maupun mengambil keputusan untuk mengambil langkah kedepan. Pendidikan memungkinkan masyarakat mempelajari pengetahuan teknis yang diperlukan untuk memimpin dan menjalankan perusahaan modern serta kegiatan modern lainnya. Pengetahuan yang lebih baik sebagai hasil yang diperoleh melalui pendidikan mampu menjadi perangsang untuk menciptakan pembaharuan dalam bidang teknik, ekonomi dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya. Untuk mengukur tingkat pendidikan masyarakat salah satu indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah.

Rata-rata lama sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Rata-rata lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan

dapat dicapai oleh setiap anak. Formula yang akan digunakan untuk menentukan rata-rata lama sekolah ialah:

Dimana :

I = indeks rata-rata lama sekolah

RLS = rata-rata lama sekolah

RLSmin = rata-rata lama sekolah terendah

RLSmaks = rata-rata lama sekolah tertinggi

2.1.8.1 Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Tingkat Pengangguran Terdidik

Peningkatan kualitas SDM menjadi perhatian semua pihak dalam era melenium ini. Terlebih dalam suasana krisis multidimensi, masyarakat membutuhkan dukungan berbagai pihak untuk menghadapi persaingan bebas, untuk itu pendidikan memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas sumber daya yang dimiliki. Peningkatan pendidikan menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan potensi dasar yang dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia. Peningkatan kualitas pendidikan akan memiliki makna bagi perbaikan kualitas Indonesia secara keseluruhan.

Pendidikan adalah input (masukan) bagi fungsi produksi nasional dalam peranannya sebagai komponen modal manusia (*human capital*, yang berarti

investasi produktif dalam sumber daya manusia. Menurut teori *human capital* Seseorang dapat meningkatkan penghasilannya melalui peningkatan pendidikan, setiap tambahan satu tahun sekolah berarti, disatu pihak meningkatkan kemampuan kerja dan tingkat penghasilan seseorang. Dengan itu semakin tingginya tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang maka akan meningkatkan kemampuan kerja sehingga akan mendapatkan kualitas SDM yang baik dan nantiya akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada.

Indikator kualitas SDM dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat penduduknya. Dengan demikian negara berkembang seperti Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi memerlukan SDM yang berkualitas. Namun, tingginya kualitas itu tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, melainkan diukur dengan apa yang dihasilkan. Besarnya pengeluaran pemerintah dan masyarakat terhadap bidang pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran yang menunjukkan perhatian pada usaha pengembangan kualitas SDM. Investasi SDM yang dilakukan negara-negara maju sangat menentukan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi riil.

2.1.8.2 Jenis-Jenis Tingkat Pendidikan

Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

1. Pendidikan Umum

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Bentuknya satuan

pendidikannya yaitu: sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA).

2. Pendidikan Kejuruan

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Bentuk satuan pendidikannya adalah sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah menengah kejuruan ini memiliki berbagai macam spesialisasi keahlian tertentu.

3. Pendidikan Akademik

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

4. Pendidikan Profesi

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memasuki suatu proses atau menjadi seorang profesional.

5. Pendidikan Vokasi

Pendidikan Vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4 setara dengan program sarjana (strata 1).

6. Pendidikan Keagamaan

Pendidikan Keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang

menuntut penguasaan pengetahuan dan pengalaman terhadap ajara agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

7. Pendidikan Khusus

Pendidikan Khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkebutuhan khusus atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif (bergabung dengan sekolah biasa) atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah (dalam bentuk sekolah luar biasa/SLB).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan sebagai perbandingan dalam pencapaian data dan kajian yang terkait dengan tema yang akan diteliti. Penelitian terdahulu ini digunakan peneliti sebagai referensi dalam melakukan penelitian.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian dan Variabel	Perbedaan dan Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Rizka Febiana Putri (2015). „ Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Terhadap Pengangguran Terdidik ”	Tujuan: Mengetahui pengaruh inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah terhadap pengangguran terdidik di Jawa Tengah. Variabel Dependen: Pengangguran terdidik Variabel Independen: Inflasi, pertumbuhan	Persamaan: Variabel terikat yang sama yaitu pengangguran terdidik Menggunakan metode kuantitatif dengan data panel	Inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Tengah.

		ekonomi, upah	Variabel bebas yang sama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan upah Perbedaan: Pada penelitian ini tidak terdapat variabel angkatan kerja, kesempatan kerja dan investasi	
2.	Fitri Junaidi (2016) „Pengaruh Pendidikan, Upah dan Kesempatan Kerja terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi	Tujuan: Mengetahui pengaruh pendidikan, upah dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi. Variabel Dependen: Pengangguran terdidik Variabel Independen: Pendidikan, upah dan kesempatan kerja.	Persamaan: Objek penelitian yang sama yaitu pengangguran terdidik Variabel bebas yang sama yaitu upah, pendidikan, kesempatan kerja Perbedaan: menggunakan metode analisis regresi ordinary least square (OLS)	Menunjukkan bahwa secara simultan pendidikan, upah dan kesempatan kerja berpengaruh signifikan terhadap pengangguran terdidik. Secara parsial pendidikan berpengaruh positif dan kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jambi
3.	Wildan Aziz Amruallah (2019) „Analisis Determinan Tingkat Pengangguran Terbuka di Pulau Jawa Tahun 2007-	Tujuan: Mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB, upah minimum provinsi dan tingkat inflasi terhadap pengangguran terbuka di setiap Provinsi di Pulau	Persamaan: Menggunakan objek yang sama yaitu pengangguran terdidik Menggunakan	Menunjukkan secara parsial PDRB memiliki pengaruh signifikan, sedangkan upah minimum

	2016 ^{****}	Jawa tahun 2007-2016 Variabel Dependen: Pengangguran terdidik Variabel Independen: upah minimum provinsi, dan tingkat inflasi	metode kuantitatif Perbedaan: jangka waktu penelitian ini dari tahun 2007-2010	provinsi dan inflasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran terbuka di Pulau Jawa Tahun 2007-2016.
4.	Linda Wahyuni (2019) „ Pengaruh Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Provinsi Aceh “	Tujuan: Mengetahui pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto dan investasi terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Aceh Variabel Dependen: Pengangguran Terdidik Variabel Independen: Inflasi dan produk domestik regional bruto	Persamaan: Variabel bebas yang sama yaitu inflasi Perbedaan: Pada penelitian ini variabel bebasnya produk domestik regional bruto Jangka waktu penelitian ini dari tahun 2008-2018 Menggunakan metode analisis regresi data panel	Menunjukkan variabel inflasi dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Aceh, Sedangkan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran terdidik di Provinsi di Aceh
5.	Evelyn Harsenovia (2021) „ Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah dan Kesempatan Kerja Terhadap Pengangguran Terdidik Lulusan Universitas di Kabupaten/Kota di	Tujuan: Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah, dan kesempatan kerja terhadap pengangguran terdidik lulusan Universitas di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat 2014- 2019. Variabel Dependen:	Persamaan: Objek penelitian yang sama yaitu pengangguran terdidik Menggunakan metode analisis regresi data panel Variabel bebas yang sama yaitu pertumbuhan	Menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, upah dan kesempatan kerja berpengaruh positif terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa

	Provinsi Jawa Barat 2014-2019 ^{****}	Pengangguran terdidik Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi, upah dan kesempatan kerja.	ekonomi, upah, dan kesempatan kerja Perbedaan: Jangka waktu penelitian ini dari tahun 2014-2019 Tidak menggunakan variabel investasi	Barat.
6.	Hesti Khoirun L.F (2018) „ Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik di Indonesia Tahun 1999-2018 ” ^{****}	Tujuan: Untuk menganalisis pengaruh tingkat pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan penduduk terhadap pengangguran terdidik di Indonesia tahun 1999-2018 Variabel Dependen : Pengangguran terdidik Variabel Independen : Tingkat pendidikan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk	Persamaan: Menggunakan objek yang sama yaitu pengangguran terdidik Menggunakan metode kuantitatif Perbedaan : Jangka waktu penelitian 1999-2018 Menggunakan data sekunder	Menunjukkan secara parsial tingkat pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Indonesia tahun 1999-2018. Sedangkan inflasi dan pertumbuhan penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap pengangguran terdidik di Indonesia tahun 1999-2018.

2.3 Kerangka Pemikiran

Didalam kerangka pemikiran terdapat variabel bebas dan terikat. Dimana yang dianggap sebagai variabel bebas terdiri atas tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan. Sedangkan yang dianggap sebagai variabel terikat yaitu tingkat pengangguran terdidik. Bila kerangka pemikiran untuk mengkaji bagaimana hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat:

Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan dimana terjadi perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh penambahan barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Setiap ada peningkatan presentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berorientasi pada padat karya akan memberikan kesempatan kerja lebih besar terhadap pekerja sehingga dengan demikian tingkat pengangguran terdidik dapat turun. Apabila pertumbuhan ekonomi rendah berarti terjadi penurunan dalam produksi barang dan jasa yang diakibatkan oleh kekurangan pengeluaran agregat. Akibat dari penurunan produksi barang dan jasa, pengusaha dan pabrik akan mengurangi bebanya dengan melakukan pemutusan hubungan kerja sehingga mengakibatkan naiknya tingkat pengangguran terdidik. Sehingga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik.

Kenaikan upah minimum provinsi memiliki dua efek berlawanan pada penawaran tenaga kerja. Pertama, efek substitusi, yang menyebabkan setiap pekerja bekerja lebih lama karena upah yang mereka terima untuk setiap jam kerja lebih tinggi. Kedua, efek pendapatan memiliki efek sebaliknya, bahwa upah yang lebih tinggi membuat pekerja lebih suka bermalas-malasan dan lebih banyak berbelanja untuk masyarakat. Kenaikan upah minimum provinsi akan menyebabkan peningkatan tingkat pengangguran terdidik di Provinsi di Pulau Jawa karena tingkat pengangguran terdidik disebabkan oleh kekakuan upah, yaitu ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan keseimbangan dimana penawaran tenaga kerja berada. Oleh karena itu, pengangguran terjadi karena ketakutan akan upah karena adanya penyesuaian antara jumlah tenaga kerja yang ingin bekerja dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Namun kenaikan tingkat upah minimum provinsi menyebabkan peningkatan penawaran tenaga kerja, sehingga mengurangi permintaan tenaga kerja. Jika seluruh upah yang ditawarkan besarnya dibawah tingkat upah minimum provinsi, seorang pekerja akan menolak mendapatkan upah tersebut dan hal ini akan menyebabkan tingkat pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah, maka akan berakibat pada tingginya jumlah pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Apabila ditinjau dari sisi pengusaha, meningkatnya upah akan meningkatkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat pada peningkatan tingkat pengangguran.

Inflasi ialah gambaran dari peningkatan permintaan agregat. Dengan meningkatnya permintaan pasti akan menaikkan harga barang. Dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin padat, para produsen tentunya akan lebih banyak memproduksi hasil produksinya (barang). Ketika terjadi inflasi khususnya inflasi dalam barang-barang produksi, maka menyebabkan biaya produksi meningkat. Maka, harga barang meningkat, permintaan barang menurun, produksi menurun dan kebutuhan tenaga kerja menurun. Kebutuhan pekerja yang menurun akan menyebabkan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan meningkatkan tingkat pengangguran terdidik. Dari penjelasan tersebut maka dapat diketahui bahwa inflasi memiliki hubungan positif dengan tingkat pengangguran terdidik.

Investasi merupakan bentuk upaya menambah modal untuk pembangunan melalui investor dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan teori Harrod Domar bahwa investasi tidak hanya menciptakan permintaan tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Artinya, semakin besar kapasitas produksi akan membutuhkan tenaga kerja yang semakin besar pula, dengan asumsi *full employment*. Karena investasi merupakan penambahan faktor-faktor produksi, yang mana salah satu dari faktor produksi adalah tenaga kerja. Dengan begitu, perekonomian secara keseluruhan dapat menyerap tenaga kerja sebanyak- banyaknya, sehingga partisipasi angkatan kerja akan semakin meningkat. Meningkatnya kesempatan kerja atau terburuknya lapangan usaha yang luas mampu menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Terdapat hubungan yang negatif antara investasi dengan tingkat

pengangguran terdidik di Provinsi di Pulau Jawa. Dilihat pada kondisi sekarang jika dengan banyaknya realisasi pada investasi tentu saja akan membuka banyaknya lapangan pekerjaan sehingga akan terserapnya angkatan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran terdidik.

Tingkat kesempatan kerja yaitu suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana semua pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang bekerja. Jika tingkat kesempatan kerja meningkat maka tingkat pengangguran terdidik berkurang.

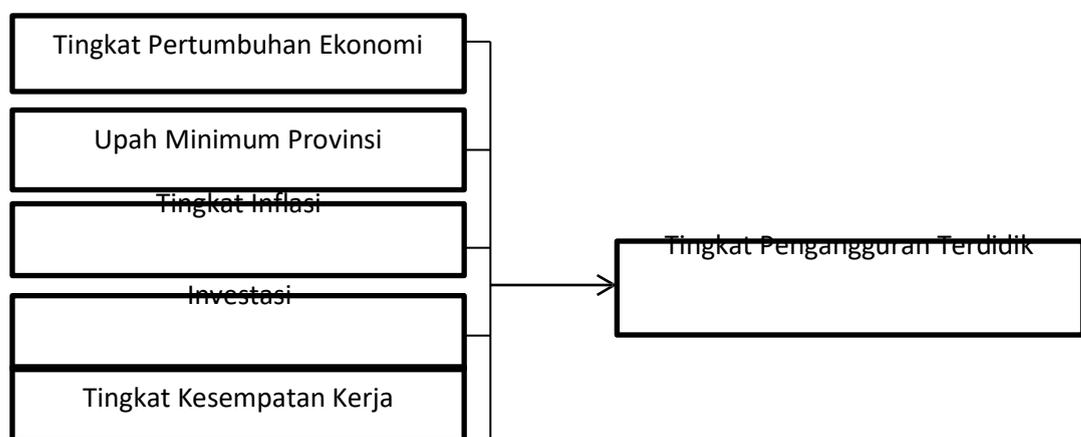
Kesempatan kerja mempunyai hubungan yang negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik. Karena hal ini disebabkan jika kesempatan kerja yang dimiliki oleh suatu daerah itu menurun maka tingkat pengangguran akan meningkat begitupun sebaliknya, dan seperti yang sudah dijelaskan bahwa kesempatan kerja adalah banyaknya yang dapat terserap untuk bekerja pada suatu perusahaan atau instansi, kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja yang tersedia.

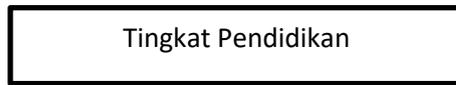
Tingkat pendidikan rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dialami. Pendidikan dapat dipandang sebagai *human investment*, karena dengan

pendidikan maka manusia terdidik dapat menjadi modal bagi pembangunan ekonomi, apabila tingkat pendidikan tinggi dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai tersebut maka para pencari kerja dapat terserap dalam lapangan pekerjaan dan bahkan mampu menciptakan lapangan kerja sehingga tingkat pengangguran juga akan turun. Sedangkan apabila tingkat pendidikan rendah maka dapat diartikan bahwa tingkat pengetahuan dan ketrampilan masyarakat rendah sehingga tingkat pengangguran akan meningkat. Makin lama waktu pendidikan atau makin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat pengangguran pun menurun hal tersebut bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik.

Pengangguran yang terjadi tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini akan menjelaskan gambaran kondisi tingkat pengangguran terdidik di Pulau Jawa, dan juga mencari faktor-faktor yang mempengaruhi pengangguran tersebut, variabel bebas yang akan diteliti pengaruhnya yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan.

Pemaparan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan pandangan atau dugaan sementara, dimana dengan ini masih harus di uji kembali. Berikut hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini :

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa.
2. Upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa.
3. Tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi Pulau Jawa.
4. Investasi berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa.
5. Tingkat kesempatan kerja berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa.
6. Tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran terdidik antar Provinsi di Pulau Jawa.

BAB III

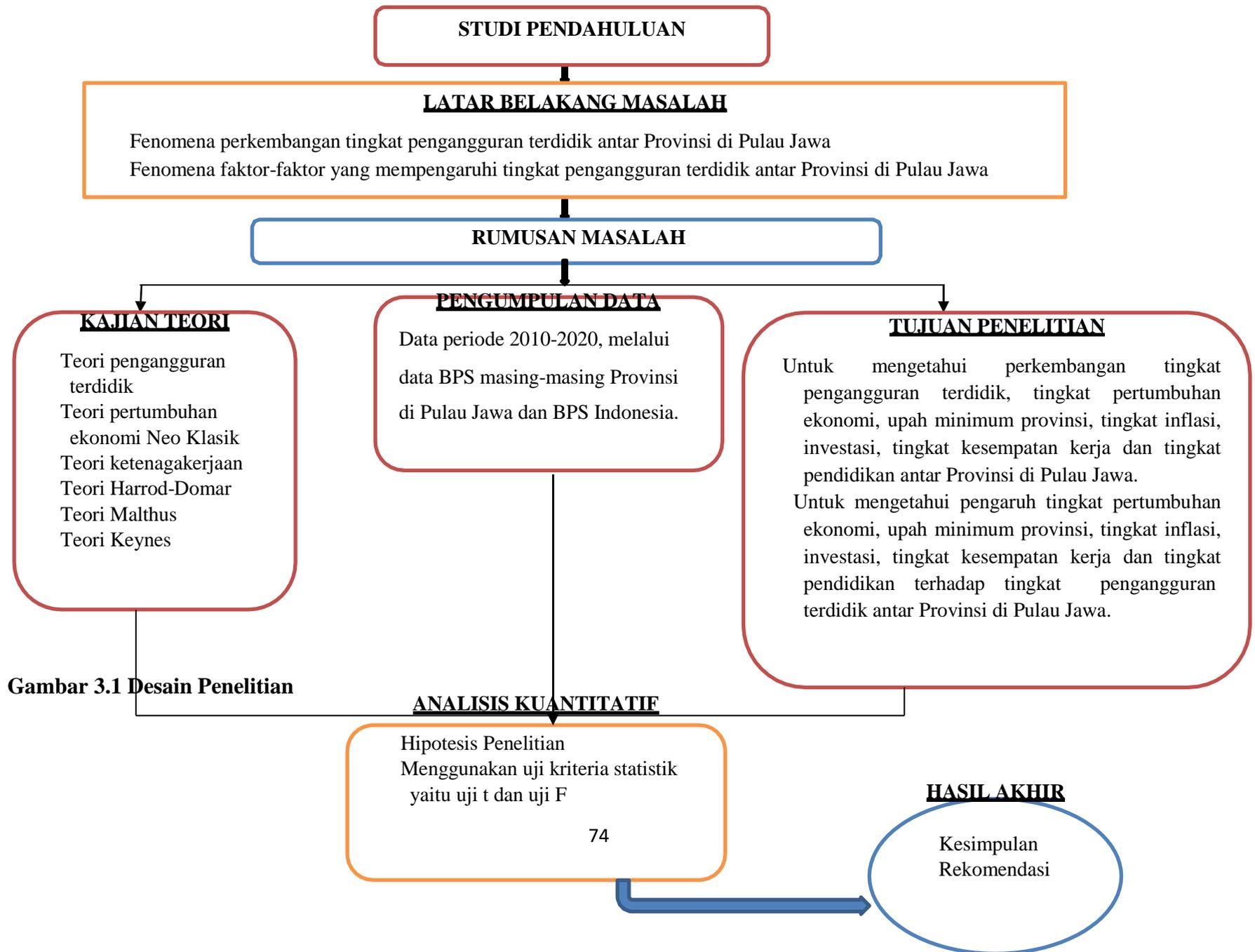
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif berfungsi untuk mendeskripsikan ataupun memberi gambaran terhadap suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2012:29). Sedangkan pendekatan kuantitatif merupakan penelitian berupa angka-angka dan analisis bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang lebih ditetapkan (Sugiyono, 2013:14). Berdasarkan tingkat ekplanasi, penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, yaitu pengaruh beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis data menggunakan regresi panel dengan data *time series* selama 10 tahun dan data *cross section* 6 Provinsi di Pulau Jawa.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk melaksanakan riset pemasaran (Malhotra, 2007). Dalam penelitian yang baik, terdapat desain penelitian sebagai rancangan penelitian yang dilakukan dalam menyelesaikan tujuan peneliti, yang efektif dan efisien. Oleh karena itu terdapat desain penelitian sebagai berikut:



Gambar 3.1 Desain Penelitian

3.3 Definisi dan Operasional Variabel Penelitian

Menurut Arikunto (2010), variabel penelitian adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu titik peneliti. Pada definisi variabel penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat (*Dependent*) dan variabel bebas (*Independent*).

Definisi operasional variabel merupakan penelitian yang bertujuan untuk memberikan informasi pengukur variabel-variabel. Definisi operasional diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pusat perhatian dengan memberikan pengaruh yang mempunyai nilai.

3.3.1 Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh faktor lain yaitu faktor yang muncul, atau tidak muncul, atau berubah sesuai dengan yang diteliti. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah tingkat pengangguran terdidik (Y). Pengangguran terdidik merupakan rasio jumlah pencari kerja yang berpendidikan SMA, Diploma/Sarjana terhadap besarnya angkatan kerja pada kelompok tersebut.

3.3.2 Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Variabel *independent* atau sering disebut dengan variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel *dependent* atau variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan.

3.3.3 Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel dibuat sebelum mengumpulkan data. Berikut operasional variabel pada penelitian ini yang disajikan dalam bentuk tabel.

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

No	Jenis Variabel	Nama Variabel	Definisi Variabel	Satuan
1.	<i>Variabel Terikat</i>	Tingkat Pengangguran Terdidik (Y)	Jumlah pencari kerja yang memiliki pendidikan SMA, Diploma dan Sarjana	Persen (%) / Tahun
2.	<i>Variabel Bebas</i>	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (X1)	Pertumbuhan PDRB antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2020	Persen (%) / Tahun
3.	<i>Variabel Bebas</i>	Upah Minimum Provinsi (X2)	Upah minimum provinsi yang berlaku di seluruh wilayah yang berada di satu provinsi, termasuk kabupaten/kota.	Rupiah / Tahun
4.	<i>Variabel Bebas</i>	Tingkat Inflasi (X3)	Gejala kenaikan harga barang-barang dan jasa yang bersifat umum dan terus menerus di beberapa Provinsi di Pulau Jawa	Persen (%) / Tahun
5.	<i>Variabel Bebas</i>	Investasi (X4)	Jumlah investasi PMDN dan PMA antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2020	Miliar Rupiah / Tahun
6.	<i>Variabel Bebas</i>	Tingkat Kesempatan Kerja (X5)	Peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja	Persen (%) / Tahun

7.	<i>Variabel Bebas</i>	Tingkat Pendidikan (X8)	Rata-Rata Lama Sekolah antar Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2010-2020	Tahun
----	-----------------------	-------------------------	---	-------

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumenter yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) secara nasional maupun regional yang mencakup 6 Provinsi di Pulau Jawa dari tahun 2010-2020. Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Informasi lain bersumber dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah dan buku-buku teks.

3.5 Metode Analisis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk melakukan gambaran secara umum terhadap kondisi variabel-variabel yang diteliti. Pendekatan Kuantitatif, digunakan untuk melakukan uji hipotesis melalui pengolahan dan pengujian data. Untuk menggunakan model analisis pertumbuhan sehingga dapat menjelaskan hasil pengujian berdasarkan data yang mendukung penelitian ini.

3.6 Model Analisis Pertumbuhan

Model pertumbuhan untuk mengukur perkembangan setiap variabel secara umum model analisis pertumbuhan adalah sebagai berikut

Dimana:

g = pertumbuhan

X = variabel tingkat pertumbuhan ekonomi (X1), upah minimum provinsi (X2), tingkat inflasi (X3), investasi (X4), tingkat kesempatan kerja (X5), tingkat pendidikan (X6).

t = tahun

$t-1$ = tahun sebelumnya

3.7 Model Analisis Data Panel

Model analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dengan runtun waktu (*Time series*) yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dan besar pengaruh antara variabel bebas tingkat pertumbuhan ekonomi, upah minimum provinsi, tingkat inflasi, investasi, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pendidikan. Berikut model penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam bentuk persamaan estimasi penelitian ini.

$$\mathbf{TPT} = \mathbf{f} (\mathbf{TPE,UMP,TI,INV,TKK,TP})$$

Dari fungsi di atas dijadikan persamaan regresi data panel dan berikut ini adalah bentuk persamaan regresi data panel yang mencakup dua atau lebih variabel yaitu:

$$\mathbf{TPT}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \mathbf{TPE}_{it} + \beta_2 \mathbf{UMP}_{it} + \beta_3 \mathbf{TI}_{it} + \beta_4 \mathbf{INV}_{it} + \beta_5 \mathbf{TKK}_{it} + \beta_6 \mathbf{TP}_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

\mathbf{TPT}_{it} = Tingkat Pengangguran Terdidik (Persen/Tahun)

TPE_{it} = Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (Persen/Tahun)

UMP_{it} = Upah Minimum Provinsi (Rupiah/Tahun)

TI_{it} = Tingkat Inflasi (Persen/Tahun)

INV = Investasi (Miliar Rupiah/Tahun)

TKK_{it} = Tingkat Kesempatan Kerja (Persen/Tahun)

TP_{it} = Tingkat Pendidikan (Tahun)

i = 6 Provinsi di Pulau Jawa (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur)

t = Tahun 2010-2020

e = error term

3.7.1 Uji Spesifikasi Model dengan Chow

Uji Chow digunakan untuk memilih antara model *fixed effect* atau model *common effect* yang sebaiknya dipakai. Apabila hasil uji spesifikasi ini menunjukkan probabilitas Chi-square lebih dari 0,05 maka model yang dipilih adalah *common effect*. Sebaliknya, apabila probabilitas Chi-square kurang dari 0,05 maka model yang sebaiknya dipakai adalah *fixed effect*. Hipotesis tersebut adalah sebagai berikut:

- $H_0 : \beta_1 = 0$ (maka digunakan model *common effect*)
- $H_1 : \beta_1 \neq 0$ (maka digunakan model *fixed effect*)

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji chow adalah sebagai berikut:

- Jika nilai Probability F > 0, 05 artinya H₀ diterima; maka menggunakan model *common effect*.
- Jika nilai Probability F < 0,05 artinya H₀ ditolak; maka model *fixed effect*, dilanjut dengan uji hausman.

3.7.2 Uji Spesifikasi Model dengan Hausman

Ketika model yang terpilih adalah *fixed effect* maka perlu dilakukan uji lagi, yaitu uji Hausman untuk mengetahui apakah sebaiknya memakai *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Uji Hausman ini bertujuan untuk mengetahui model yang sebaiknya dipakai, yaitu *fixed effect model* (FEM) atau *random effect model* (REM). Dalam FEM setiap obyek memiliki intersep yang berbeda-beda, akan tetapi intersep masing-masing obyek tidak berubah seiring waktu. Hal ini disebut dengan *time-invariant*. Sedangkan dalam REM, intersep (bersama) mewakili nilai rata-rata dari semua intersep (*cross section*) dan komponen mewakili deviasi (acak) dari intersep individual terhadap nilai rata-rata tersebut (Gujarati:2013). Hipotesis dalam uji Hausman sebagai berikut:

H₀ : $\beta_1 = 0$ (maka digunakan model *random effect*)

H₁ : $\beta_1 \neq 0$ (maka digunakan model *fixed effect*)

Pedoman yang akan digunakan dalam pengambilan kesimpulan uji hausman adalah sebagai berikut:

- Jika nilai probability Chi-Square > 0,05 maka H₀ diterima, yang artinya menggunakan model *random effect*.

- Jika nilai probabilitas Chi-square $< 0,05$ maka H_0 ditolak, yang artinya menggunakan model *fixed effect*.

3.8 Pengujian Model Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelayakan data untuk dianalisis apakah berpengaruh atau tidak terhadap variabel yang diteliti. Analisis regresi yang dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS) harus memenuhi syarat uji asumsi klasik yang terdiri uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

3.8.1 Uji Normalitas

Uji Normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang telah distandarisi pada model regresi berdistribusi normal atau tidak. Normalitas dilihat dari nilai probabilitas *Jarque-Bera* (JB). Apabila nilai probabilitas $>5\%$ maka residual terdistribusi dengan normal.

3.8.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya hubungan antar beberapa atau semua variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Multikolinearitas adalah suatu keadaan di mana satu atau lebih variabel independen dinyatakan sebagai kondisi linier dengan variabel lainnya. Apabila diantara variabel bebas yang digunakan sama sekali tidak berkorelasi antara satu dengan lainnya maka bisa dikatakan tidak terjadi multikolinearitas. Jika koefisien diantara masing-masing variabel bebas lebih besar dari 0,08 maka

terjadi multikolinearitas. Namun jika nilai matriks korelasi semua variabel kurang dari 0,08 maka tidak terjadi multikolinearitas. Hipotesis yang digunakan dalam uji multikolinearitas ini adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak terjadi multikolinearitas

H_1 : Terjadi multikolinearitas

Jika koefisien korelasi $>$ dari 0,08 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya terjadi multikolinearitas. Sedangkan apabila koefisien korelasi $<$ 0,08 maka H_0 diterima, tidak terjadi multikolinearitas.

3.8.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji, apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas, yaitu keadaan di mana *variance* dari residual satu pengamatan terhadap pengamatan lain tetap. Hipotesis dalam uji heteroskedastisitas ini adalah:

H_0 : Terdapat heteroskedastisitas

H_1 : Tidak teradapat heterokedastisitas

Jika $\alpha = 5\%$, H_0 ditolak jika *obs*R-square* $>$ X^2 atau *p-value* $<$ α . Kemudian apabila variabel bebas secara statistik mempengaruhi variabel terikat maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Hasil output yang menunjukkan nilai *probabiliy* dari masing-masing variabel independen adalah $>$ 0,05 maka H_1 diterima.

3.8.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi autokorelasi, maka dalam persamaan regresi linier tersebut terdapat masalah, hasil yang baik seharusnya tidak ada indikasi terjadinya autokorelasi. Untuk menguji autokorelasi tersebut digunakan metode Durbin-Watson, dengan hipotesis sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada autokorelasi

H_1 : Terdapat autokorelasi

Terdapat beberapa kriteria untuk menentukan terdapat autokorelasi atau tidak dalam regresi linier dengan metode *lagrange multiplier*:

- Jika probabilitas *chi-squares* > taraf signifikansi maka H_0 diterima atau tidak terdapat autokorelasi.
- Jika probabilitas *chi-squares* < taraf signifikansi maka H_0 ditolak atau terdapat autokorelasi pada model tersebut.

3.9 Pengujian Statistik

Pada pengolahan data penelitian terdapat proses yang harus dilakukan. Pada kesempatan ini penulis menggunakan analisis regresi. Oleh karena itu terdapat analisis ekonomi berdasarkan metode yang telah dibuat, terdapat Uji Statistik t , Uji Statistik F , dan Koefisien Determinasi (R^2).

3.9.1 Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh tiap variabel *independen* secara individu terhadap variabel *dependen*. Uji t ini merupakan pengujian koefisien regresi masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependen* untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen*.

Dalam perumusan hipotesis statistik, antara hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1) selalu berpasangan, apabila salah satu ditolak maka yang lain pasti diterima, sehingga dapat membuat keputusan yang tegas, yaitu apabila H_0 ditolak maka H_1 diterima (Sugiyono, 2012:87). Untuk menguji pengaruh variabel *independen* terhadap variabel *dependen* dapat dibuat hipotesa:

$H_0 : \beta = 0$, maka variable *independent* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable *dependent*.

$H_1 : \beta \neq 0$, maka variable *independent* berpengaruh secara signifikan terhadap variable *dependent*.

Kriteria uji hipotesis :

- a. Jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya variable *independent* berpengaruh secara signifikan terhadap variable *dependent*.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima artinya variable *independent* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable *dependent*.



Gambar 3.2 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 (t-tabel)

3.9.2 Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel *independent* secara simulta mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel *dependent*. Untuk menguji pengaruh variabel *independent* terhadap variabel *dependent* dapat dibuat hipotesis.

Uji F digunakan mengetahui pengaruh variable *independent* secara simultan terhadap variable *dependent*. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

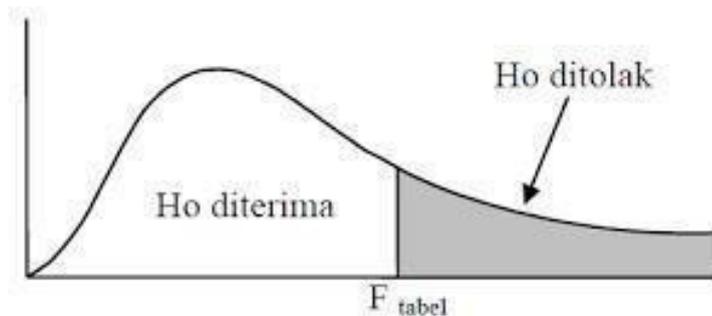
$H_0 : \beta = 0$, maka variable *independent* secara simultan tidak berpengaruh terhadap variable *dependent*.

$H_1 : \beta \neq 0$, maka variable *independent* secara simultan berpengaruh terhadap variable *dependent*.

Kriteria uji hipotesis

- a. Jika nilai Fhitung > Ftabel, maka H_0 ditolak artinya variable *independent* secara simultan berpengaruh terhadap variable *dependent*.

- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima artinya variable *independent* secara simultan tidak berpengaruh terhadap variable *dependent*.



Gambar 3.3 Daerah Penerimaan dan Penolakan H_0 (f -tabel)

3.9.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model menerangkan variasi variabel *dependen*. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil bermakna kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai yang mendekati 1 bermakna variabel-variabel *independen* memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel *dependen*.

